

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENANGGULANGAN BENCANA (FPRB)

Surya Armi¹, Pandji Santosa², Slamet Suwanto³
syafa1428@gmail.com¹, pandjisantosa@gmail.com², Slametsuwanto@gmail.com³,
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam manajemen bencana pada Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tarahan Bersatu di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Kerangka kebijakan yang menjadi acuan dalam upaya ini adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014, yang memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah, lokal, maupun non pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program manajemen bencana.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen, dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik Edward III untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung utama, hambatan, dan strategi optimalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PUG didukung oleh komitmen pelaksana program, kolaborasi lintas sektor, peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan kebencanaan, serta penguatan kelembagaan melalui pembentukan divisi khusus dan pelatihan yang responsif gender. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti belum adanya tim khusus gender di tubuh FPRB, keterbatasan tenaga ahli gender, alokasi anggaran yang masih minim, serta belum tersedianya mekanisme umpan balik yang terstruktur.

Sebagai respons, FPRB telah menginisiasi sejumlah langkah optimalisasi, antara lain pembentukan focal point PUG, penguatan advokasi dan kebijakan internal, peningkatan komunikasi dua arah, penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis umpan balik, pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia, pelibatan tenaga ahli gender, serta pengembangan anggaran desa yang responsif gender. Selain itu, penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dan peningkatan koordinasi antar-divisi juga ditekankan untuk memastikan implementasi PUG berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Studi ini memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi gender dalam upaya pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pengarusutamaan gender, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Partisipasi perempuan, Manajemen bencana

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Gender Mainstreaming (PUG) policies in disaster management at the Tarahan Bersatu Disaster Risk Reduction Forum (FPRB) in Tarahan Village, Katibung District, South Lampung Regency. The policy framework guiding this

effort is Regulation No. 13 of 2014 issued by the Head of BNPB, which provides a reference for stakeholders including governmental, local, and non-governmental actors in integrating gender perspectives into disaster management programs. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and analyzed using Edward III's public policy implementation theory to identify key supporting factors, barriers, and optimization strategies. The findings show that successful PUG implementation is supported by the commitment of program implementers, cross-sectoral collaboration, increased female participation in disaster-related activities, and institutional strengthening through the establishment of specific divisions and gender-responsive training. However, several challenges remain, such as the lack of a dedicated gender team within the FPRB, limited availability of gender experts, insufficient budget allocation, and the absence of a structured feedback mechanism. In response, FPRB has initiated several optimization measures, including the formation of PUG focal points, enhancement of advocacy and internal policies, promotion of two-way communication, implementation of feedback-based monitoring and evaluation systems, continuous training for human resources, engagement of gender specialists, and the development of gender-responsive village budgets. Additionally, strengthening women's leadership capacity and improving inter-divisional coordination are emphasized to ensure that the implementation of PUG is effective, inclusive, and sustainable. This study offers strategic recommendations to stakeholders for reinforcing gender integration in community-level disaster risk reduction efforts

Keywords: Policy implementation, Gender mainstreaming, Disaster Risk Reduction Forum (FPRB), Women's participation, Disaster management

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua benua Asia dan Australia serta dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Pasifik, menghadapi berbagai tantangan terkait kerentanan terhadap bencana alam. Dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau dan 128 gunung berapi aktif, serta posisi strategis di Cincin Api Pasifik yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, Indonesia secara geografis sangat rawan terhadap bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor (Winarno et al., 2023; Pramudya et al., 2022). Potensi bencana ini diperparah oleh keberadaan sekitar 295 sesar aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2022 mencatat terjadi 3.544 peristiwa bencana dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 10,6 triliun, yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman bencana di Indonesia (BNPB, 2023).

Provinsi Lampung Selatan adalah salah satu wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), dengan risiko tinggi terhadap bencana banjir, gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan (BPBD Lampung Selatan, 2020). Tsunami yang melanda Kabupaten ini pada 2018 menimbulkan korban jiwa dan kerusakan material yang cukup besar, khususnya di Kecamatan Katibung, yang berdampak signifikan pada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas (Sari & Widiastuti, 2021).

Kerentanan perempuan dan kelompok rentan terhadap bencana tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisik dan sosial ekonomi, tetapi juga karena ketimpangan akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta peran gender yang terstruktur dalam masyarakat (Yulianti & Ramli, 2022). Studi internasional

menunjukkan bahwa perempuan menghadapi risiko kematian akibat bencana yang lebih tinggi dibanding laki-laki akibat keterbatasan mobilitas, peran domestik, dan kurangnya akses informasi serta sumber daya (UNISDR, 2015; Smith et al., 2021). Di Indonesia, persepsi budaya yang menempatkan perempuan pada posisi mengurus rumah tangga dan keluarga semakin memperkuat ketimpangan tersebut, sehingga perempuan cenderung lebih rentan dan minim dalam pelibatan aktif pada proses penanggulangan bencana (Agustina, 2022).

Berbagai literatur terkait pengarusutamaan gender (PUG) dalam konteks kebencanaan telah menegaskan pentingnya integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga pemulihan (Hapsari & Wijaya, 2023; Nugroho & Handayani, 2021). Pengarusutamaan Gender bukan sekadar kehadiran perempuan dalam kegiatan penanggulangan bencana, tetapi juga memastikan adanya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya, dan manfaat kebijakan yang responsif gender (BNPB, 2014). Namun, sejumlah studi di Indonesia menemukan bahwa implementasi PUG dalam penanggulangan bencana masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan resistensi budaya yang membatasi peran perempuan (Sari et al., 2020; Hasanah & Putri, 2023).

Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai lembaga lokal yang mengorganisasi komunitas dalam menghadapi risiko bencana memiliki peran strategis dalam implementasi PUG. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PUG sangat bergantung pada komitmen stakeholder, keterlibatan aktif perempuan, serta adanya mekanisme inklusif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (Wulandari & Rahmawati, 2022; Purnamasari

& Setiawan, 2024). Namun, di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Desa Tarahan, pelibatan perempuan dalam FPRB dan kegiatan penanggulangan bencana masih terbatas dan belum menunjukkan integrasi gender yang optimal (BPBD Lampung Selatan, 2022; Larasati, 2022).

Kesenjangan dalam literatur saat ini terletak pada kurangnya penelitian empiris yang secara mendalam mengkaji proses implementasi PUG di tingkat desa, khususnya pada mekanisme kerja FPRB dalam konteks risiko bencana tsunami di daerah rawan seperti Lampung Selatan. Studi sebelumnya banyak menekankan pada aspek kebijakan secara makro atau pemetaan risiko bencana tanpa mengkaji secara komprehensif dinamika sosial, hambatan budaya, dan strategi peningkatan partisipasi perempuan di tingkat lokal (Fauzi et al., 2021; Wibowo & Rahman, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada implementasi kebijakan PUG dalam pengelolaan risiko bencana melalui FPRB di Desa Tarahan.

Penelitian ini menjadi penting karena selain mengisi gap dalam literatur, hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan nasional dalam memperkuat peran gender dalam kebijakan penanggulangan bencana. Hal ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 yang menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam penanggulangan bencana serta perlunya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (BNPB, 2014). Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim global, upaya pengarusutamaan gender menjadi semakin krusial untuk meningkatkan ketahanan sosial dan perlindungan kelompok rentan.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini membatasi fokus pada implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang penanggulangan bencana melalui

aktivitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tarahan Bersatu di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan PUG telah diimplementasikan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta menggali upaya-upaya optimalisasi pelaksanaan PUG dalam konteks penanggulangan bencana tsunami di daerah tersebut. Risiko bencana merupakan kemungkinan terjadinya dampak negatif akibat suatu peristiwa bencana yang dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2007; CNN Indonesia, 2023). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko diartikan sebagai akibat kurang menyenangkan dari suatu tindakan, sedangkan bencana didefinisikan sebagai peristiwa yang menyebabkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan (KBBI, 2022). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat akibat faktor alam, non-alam, atau manusia yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda (UU No. 24/2007). Risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat bencana dalam suatu wilayah dan waktu tertentu, meliputi kematian, luka, kerusakan harta, dan gangguan sosial (Peraturan Kepala BNPB No. 2/2012). Dengan demikian, risiko bencana muncul dari kombinasi unsur bahaya dan kerentanan yang memicu dampak negatif pada masyarakat (BNPB, 2012).

Kebijakan publik merupakan keputusan atau pilihan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menjalankan program dan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat. Definisi kebijakan publik menekankan pada apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah,

mencakup serangkaian keputusan yang menggunakan kewenangan otoritatif untuk mengatasi masalah publik (Dye, 2019). Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan menjadi tahap krusial yang memastikan tujuan kebijakan dapat tercapai melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dengan dukungan sumber daya yang memadai (Hill & Hupe, 2020). Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III menekankan empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards, 2014). Komunikasi yang efektif menjamin penyampaian informasi kebijakan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana, sedangkan sumber daya mencakup ketersediaan tenaga ahli, anggaran, fasilitas, dan informasi yang cukup untuk mendukung pelaksanaan. Disposisi mengacu pada kemauan dan sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sementara struktur birokrasi mengatur hubungan organisasi dan prosedur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan (Edwards, 2014). Dengan memahami dan mengelola keempat variabel tersebut, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal (Hill & Hupe, 2020).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam konteks penanggulangan bencana di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya menyoroti implementasi PUG di Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tarahan Bersatu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang bertujuan meningkatkan partisipasi gender. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2023),

keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang mendukung kesetaraan, serta struktur birokrasi yang efisien menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan PUG. Konsep partisipasi menurut Aprillia Theresia et al. (2014) turut menguatkan bahwa keterlibatan aktif individu, khususnya perempuan, penting untuk mencapai manfaat bersama dalam kebijakan penanggulangan bencana.

Penelitian lain oleh Suci Fitrah Syari (2023) di Kota Palu menunjukkan bahwa implementasi pemulihan pascabencana masih menghadapi hambatan dalam mengakomodasi perspektif gender. Sementara itu, Elintia dkk. (2024) melalui studi literatur menegaskan bahwa BNPB telah mengintegrasikan prinsip gender melalui kebijakan dan tim penggerak PUG. Di Kabupaten Bantul, Ramailis dan Nurfadni (2024) menemukan bahwa BPBD memperkuat kapasitas perempuan melalui pelatihan dan partisipasi dalam perencanaan. Ratu Riyaning Arum Parasasri dan Ismi Nurhaeni (2021) menyoroti inovasi layanan responsif gender di BPBD Surakarta meski menghadapi kendala teknis dan sumber daya. Sedangkan di Kabupaten Sleman, Nastiti dan Nala Nourma (2016) mengungkapkan bahwa kebijakan BPBD belum spesifik gender dan data belum terpilah, sehingga peran aktif perempuan masih perlu diperkuat. Seluruh penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan pendekatan kualitatif dan menempatkan pentingnya integrasi gender dalam kebijakan kebencanaan, meskipun berbeda dari sisi lokasi, fokus, serta pendekatan analisis yang digunakan.

Pada penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang penanggulangan bencana pada Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tarahan Bersatu

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena bertujuan menggali informasi mendalam dari realitas sosial yang kompleks secara alami. Sejalan dengan Maloeng (dikutip Salsabila Nanda, 2024), metode ini fokus memahami fenomena dalam konteks sosial melalui interaksi komunikasi intens antara peneliti dan objek studi. Selain itu, penelitian kualitatif mengkaji sikap, motivasi, dan tindakan subjek secara holistik dengan deskripsi berbentuk kata dan bahasa dalam konteks alami menggunakan berbagai cara ilmiah (Maleong, 2017).

Pendekatan kualitatif dengan desain sirkuler yang fleksibel, berfokus pada eksplorasi makna sosial. Studi kasus dilakukan pada Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Tarahan Bersatu, Lampung Selatan, untuk mengkaji implementasi kebijakan Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana. Data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan anggota FPRB dan observasi, kemudian dianalisis dan diverifikasi secara berkelanjutan.

Fokus penelitian adalah keterlibatan perempuan anggota FPRB Desa Tarahan Bersatu dalam penanggulangan bencana, khususnya pada tahap pra bencana.

Penarikan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling memilih informan berdasarkan kriteria relevan untuk mendapatkan informasi mendalam. *Snowball sampling* dilakukan dengan meminta rekomendasi dari informan awal untuk menemukan narasumber lain yang relevan, sehingga proses pengambilan sampel berlangsung bertahap selama penelitian. Teknik ini sesuai untuk penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman fenomena secara holistik.

Operasional parameter menentukan fokus penelitian dengan menjelaskan apa yang

diamati dan cara mengukurnya. Menurut Walizer dan Winer dalam Mushilhin (2013), operasional parameter membantu mengelompokkan gejala ke kategori tertentu. Parameter ini harus spesifik dan jelas, menggambarkan variabel dan aspek penting penelitian.

Analisis sesuai masalah penelitian berpedoman pada teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Edward III. Menurut Bogdan (2012), analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami. Menurut Lexy J. Maleong (2014), analisis data meliputi tiga tahap:

- a. Reduksi Data: Memilah dan merangkum data agar lebih fokus pada hal penting dan relevan (Sugiyono, 2017).
- b. Penyajian Data: Mengorganisasi data dalam bentuk teks naratif, tabel, grafik, atau bagan agar mudah dipahami dan dianalisis (Miles & Huberman, dalam Sugiyono, 2017).
- c. Verifikasi Data: Memastikan kesimpulan didukung bukti valid dan konsisten selama pengumpulan data lanjutan sehingga kesimpulan dapat dipercaya (Sugiyono, 2017).

Tujuan utama analisis ini adalah menemukan teori baru yang relevan dengan fenomena yang diteliti dan menjadi dasar penelitian berikutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Pengarusutamaan Gender di FPRB

Berdasarkan UU No. 24/2007 dan PP No. 21/2008, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dibentuk di berbagai tingkat pemerintahan untuk memfasilitasi kerja sama dalam pengurangan risiko bencana. Pembentukan FPRB desa/kelurahan harus melibatkan berbagai unsur masyarakat

termasuk kelompok rentan seperti perempuan, difabel, dan kelompok marjinal, sesuai Peraturan Kepala BNPB No.1/2012.

BNPB mensyaratkan minimal 45% anggota FPRB adalah perempuan untuk menjaga keseimbangan gender. Desa Tarahan membentuk FPRB bernama FPRB Tarahan Bersatu pada 23 November 2023, dengan komposisi 14 perempuan (46,67%) dan 16 laki-laki (53,33%) dari berbagai unsur masyarakat seperti pemuda, kader PKK, dan LPM. FPRB ini diformalkan melalui SK Kepala Desa.

Struktur FPRB terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 5 Koordinator Divisi, masing-masing beranggotakan 3-5 orang dengan keterwakilan perempuan di tiap divisi. Perempuan menempati posisi strategis seperti Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Divisi Pemulihan, sehingga turut aktif dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi perempuan dalam FPRB Tarahan Bersatu sangat aktif dan tidak menghadapi kendala sosial atau budaya. Perempuan bahkan sering menginisiasi dan memimpin kegiatan. Hal ini tercermin dalam best practice yang menunjukkan suara perempuan sudah didengar dan berperan penting dalam forum.

Dengan pengarusutamaan gender, program FPRB menjadi lebih inklusif, seperti adanya posko pengungsian dan dapur umum yang responsif gender dalam Rencana Aksi Komunitas. FPRB berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang menguatkan sistem pengurangan risiko bencana secara menyeluruh dan berkontribusi pada terwujudnya Desa Tangguh Bencana yang berbasis masyarakat.

Analisis Implementasi Kebijakan dengan Teori Edward III

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk memastikan akses dan partisipasi setara antara

laki-laki dan perempuan dalam pengurangan risiko, tanggap darurat, dan pemulihan. FPRB menjadi wadah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan ini di tingkat komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi kebijakan PUG dalam FPRB; (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya; serta (3) merumuskan upaya optimalisasi pelaksanaannya. Analisis menggunakan Teori Edward III yang mencakup empat komponen implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini membantu mengkaji efektivitas pelaksanaan PUG, mengungkap kendala lapangan, serta merumuskan strategi perbaikan. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi yang memperkuat peran FPRB dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif dan responsif gender.

Komunikasi

Komunikasi memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Edward III, yang menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan terarah. Dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang penanggulangan bencana, komunikasi dilakukan melalui sosialisasi oleh fasilitator kepada kepala desa dan stakeholder, penggunaan media seperti poster, serta penyampaian langsung saat kegiatan lapangan. Arahan BNPB mengenai keterwakilan perempuan (minimal 45%) telah disampaikan sejak awal pembentukan FPRB Desa Tarahan dan berhasil mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam organisasi tersebut. Namun, kegiatan sosialisasi oleh pengurus FPRB belum dilakukan secara rutin dan mendalam, sehingga pemahaman masyarakat terhadap isu PUG masih terbatas.

Selain itu, belum tersedianya mekanisme khusus yang terstruktur untuk mengelola dan

mendokumentasikan umpan balik dari masyarakat menjadi kendala dalam membangun komunikasi dua arah yang efektif. Meskipun ada interaksi langsung dalam kegiatan, masukan masyarakat tidak selalu tercatat dan ditindaklanjuti. Koordinasi antarinstansi, seperti BPBD dan Dinas P3A, telah dilakukan namun belum sepenuhnya sistematis dalam merespons isu-isu gender yang muncul di lapangan. Dampaknya, meskipun komunikasi belum optimal, terdapat peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan yang kini mulai menempati posisi strategis di FPRB. Untuk memperkuat implementasi kebijakan PUG, diperlukan pembentukan focal point PUG, penguatan advokasi kebijakan, peningkatan intensitas sosialisasi, pengembangan sistem umpan balik yang terdokumentasi, serta koordinasi lintas sektor yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang penanggulangan bencana, dimensi sumber daya sebagaimana dikemukakan Edward III menjadi faktor penting yang masih menghadapi berbagai tantangan. Belum tersedia SDM yang memiliki keahlian khusus tentang gender baik di tingkat desa maupun BPBD, sehingga pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip gender masih sangat bergantung pada kegiatan pelatihan dan transfer pengetahuan dari fasilitator atau tenaga ahli eksternal. Selain itu, alokasi anggaran khusus untuk kegiatan kebencanaan yang responsif gender belum tersedia secara memadai, baik dalam struktur desa maupun di BPBD, meskipun sudah ada koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta upaya mengintegrasikan keterwakilan perempuan dalam kegiatan.

Di sisi lain, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menunjukkan peran aktif

dalam menginisiasi pendekatan responsif gender, meskipun dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Kegiatan FPRB seperti pelatihan gender, pembersihan jalur evakuasi, dan pembangunan sarana mitigasi struktural seperti jalur evakuasi yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan menunjukkan adanya kemajuan partisipatif dari masyarakat. Namun, masih dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM, dukungan anggaran yang lebih memadai, serta integrasi kebijakan PUG dalam dokumen perencanaan desa seperti RKPDes agar pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Disposisi

Dimensi disposisi dalam teori implementasi kebijakan Edward III menyoroti pentingnya sikap, komitmen, dan kesadaran pelaksana terhadap substansi kebijakan yang diimplementasikan. Dalam konteks pengarusutamaan gender (PUG) pada penanggulangan bencana, disposisi menjadi elemen kunci agar prinsip kesetaraan gender benar-benar terintegrasi dalam setiap tahapan kebijakan. Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmennya melalui Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang PUG di bidang penanggulangan bencana. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen kepala daerah. Di tingkat daerah, Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun dokumen perencanaan kontinjensi tsunami yang responsif gender, dan Bappeda telah merevisi dokumen rencana penanggulangan bencana agar lebih inklusif. Sementara itu, keterbatasan anggaran di BPBD menyebabkan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai pemangku tugas utama.

Dari sisi non-pemerintah, FPRB menunjukkan disposisi positif melalui peningkatan kapasitas anggotanya terkait peran perempuan dalam kebencanaan dan pemahaman terhadap konsep responsif gender. FPRB juga turut menyusun rencana aksi komunitas yang memperhatikan kebutuhan perempuan, seperti jalur evakuasi yang ramah gender. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan melalui forum seperti pengajian dan arisan, telah dilakukan sebagai bentuk penyebarluasan nilai-nilai PUG. Namun, kegiatan sosialisasi ini belum dilakukan secara rutin dan terstruktur. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi dimensi disposisi telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan tersusunnya dokumen responsif gender, peningkatan kapasitas pelaksana, dan inisiatif sosialisasi. Meskipun demikian, konsistensi dan kelembagaan dalam pelaksanaan prinsip PUG masih perlu diperkuat agar kebijakan penanggulangan bencana berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Struktur Birokrasi

Dimensi struktur birokrasi menurut teori Edward III menekankan pentingnya organisasi, hierarki, dan koordinasi dalam implementasi kebijakan, termasuk pengarusutamaan gender (PUG) pada penanggulangan bencana. Dalam FPRB Tarahan Bersatu, struktur organisasi sudah terbangun dengan adanya visi, misi, dan pembagian divisi, meskipun belum ada divisi khusus yang menangani isu gender secara spesifik. Isu gender diintegrasikan dalam divisi Advokasi, Kebijakan, dan Regulasi, dengan kepemimpinan perempuan pada posisi strategis sebagai indikator perhatian terhadap PUG. Namun, belum ada anggota yang ahli di bidang gender, dan sosialisasi terkait PUG masih dilakukan secara swadaya dan mandiri. Analisis struktur birokrasi menunjukkan bahwa ketiadaan unit khusus PUG berpotensi

menghambat fokus dan koordinasi dalam penerapan kebijakan gender. Divisi advokasi dapat menjadi wadah pengelolaan PUG, tetapi efektivitasnya bergantung pada integrasi kebijakan yang lebih spesifik dan dukungan sumber daya. Kepemimpinan perempuan di FPRB menjadi peluang strategis untuk memperkuat peran gender, namun perlu didukung oleh pembentukan tim khusus, peningkatan kapasitas, dan komunikasi yang efektif antar divisi. Dengan perbaikan struktur birokrasi tersebut, implementasi PUG di FPRB dapat berjalan lebih sistematis, efektif, dan berdampak positif bagi kelompok rentan, terutama perempuan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang penanggulangan bencana oleh FPRB Tarahan Bersatu telah berjalan cukup baik meskipun belum dilandasi petunjuk teknis yang bersifat mengikat. Prinsip-prinsip PUG terefleksi melalui tingginya keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi serta pelaksanaan pelatihan dan pembentukan divisi responsif gender. Berdasarkan teori Edward III, implementasi telah mencakup dimensi komunikasi, disposisi, dan struktur organisasi, meski masih terkendala pada aspek sumber daya, khususnya keterbatasan SDM ahli gender, minimnya anggaran, dan belum adanya sistem umpan balik yang terstruktur. Untuk mengoptimalkan implementasi, FPRB telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan focal point, penguatan advokasi, pelibatan ahli gender, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi antar divisi. Oleh karena itu, disarankan agar BNPB segera menyusun juknis PUG sebagai dasar operasional, BPBD memperkuat kapasitas SDM dan kepemimpinan perempuan di FPRB, serta pemerintah desa mengalokasikan anggaran dan fasilitas yang mendukung keterlibatan perempuan dan kelompok rentan

dalam penanggulangan bencana secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L. (2022). *Peran perempuan dalam penanggulangan bencana di daerah rawan tsunami: Studi kasus Desa Tarahan*. Universitas Lampung.
- Aprillia Theresia, D., Haryanto, J. T., & Kristiawan, M. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 112–123.
- BNPB. (2014). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2023). *Laporan tahunan bencana Indonesia 2022*. <https://bnpb.go.id>
- BPBD Lampung Selatan. (2020). *Kajian risiko bencana Kabupaten Lampung Selatan*. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan.
- Dye, T. R. (2019). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.
- Edwards, G. C. III. (2014). *Implementing Public Policy* (3rd ed.). CQ Press.
- Elintia, S., Rahmadani, M., & Handayani, T. (2024). Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Gender dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77–89.
- Fauzi, A., Hidayat, R., & Santoso, A. (2021). Implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana: Studi di beberapa wilayah rawan bencana di Indonesia. *Jurnal Kebencanaan Nasional*, 7(2), 45–61.
- Hapsari, D., & Wijaya, T. (2023). Integrasi perspektif gender dalam mitigasi bencana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 13(1), 89–102.
- Hasanah, R., & Putri, M. (2023). Hambatan budaya dalam pengarusutamaan gender

- pada penanggulangan bencana di daerah pesisir. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 5(1), 34–50.
- Hill, M., & Hupe, P. (2020). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (4th ed.). SAGE Publications
- Larasati, A. (2022). *Implementasi kebijakan gender dalam penanggulangan bencana: Studi kasus FPRB Tarahan Bersatu*. Universitas Lampung.
- Mulyasari, F., & Shaw, R. (2013). Gender and disaster risk reduction in Indonesia: Issues and challenges. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 5, 1-10.
- Nastiti, N., & Nourma, N. (2016). Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Bencana Indonesia*, 3(2), 55–64.
- Nugroho, S., & Handayani, P. (2021). Strategi pengarusutamaan gender dalam kebijakan penanggulangan bencana: Perspektif kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 112–125.
- Parasasri, R. R. A., & Nurhaeni, I. (2021). Manajemen Bencana Responsif Gender di BPBD Surakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 35–48.
- Pramudya, E., Yudha, R., & Sutopo, S. (2022). Analisis risiko bencana alam di Indonesia berdasarkan data BNPB. *Jurnal Geografi Indonesia*, 16(3), 210–223.
- Purnamasari, D., & Setiawan, A. (2024). Pelibatan perempuan dalam forum pengurangan risiko bencana: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Gender*, 8(1), 77–90.
- Ramailis, & Nurfadni. (2024). Pengarusutamaan Gender Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Bantul. *Jurnal Mitigasi dan Adaptasi Bencana*, 6(1), 23–34.
- Sari, M., & Widiastuti, S. (2021). Dampak tsunami 2018 di Lampung Selatan terhadap kelompok rentan. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 6(2), 123–138.
- Sari, R., Indah, A., & Santoso, T. (2020). Kendala implementasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 54–69.
- Smith, K., Brown, L., & Jones, A. (2021). Gendered vulnerability to natural disasters: A global perspective. *Disaster Prevention and Management*, 30(4), 123–137.
- Subarsono. (2023). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi (Edisi Revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syari, S. F. (2023). Pengarusutamaan Gender dalam Pemulihan Pascabencana di Kota Palu. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 10–22.
- UNISDR. (2015). *Gender and disaster risk reduction*. United Nations International Strategy for Disaster Reduction.
- Wibowo, B., & Rahman, M. (2023). Pengarusutamaan gender dalam kebijakan penanggulangan bencana: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kebencanaan dan Sosial*, 4(1), 45–60.
- Winarno, A., Putra, R., & Santoso, B. (2023). Geografi bencana alam di Indonesia